



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI

YANG HIJAU, TANGGUNG DAN SEJAHTERA, SERTA
MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH

PEMANTAPAN TRANSFORMASI

**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

RENCANA KERJA

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sehingga pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali**



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. [REDACTED]

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 8

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU 11**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 39

3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025.....	41
3.3.1	Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	41
3.3.2	Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....		48
4.1	Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025.....	49
BAB V PENUTUP		53
5.1	Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	54
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	54
5.3	Rencana Tindak Lanjut.....	55
LAMPIRAN		57



DAFTAR TABEL



Tabel 2. 1	Capaian Sasaran Strategis.....	12
Tabel 2. 2	Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	14
Tabel 2. 3	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2024	16
Tabel 2. 4	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III	17
Tabel 2. 5	Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Kesekretariatan.....	21
Tabel 2. 6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	28
Tabel 3. 1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.....	40



DAFTAR GAMBAR




Gambar 1. 1	Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Lainnya	5
Gambar 3. 1	Potensi Perikanan Tangkap	43
Gambar 3. 2	Potensi Perikanan Budidaya	44
Gambar 3. 3	Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	44
Gambar 3. 4	Garam Tradisional Lokal Bali	45
Gambar 3. 5	Potensi Perikanan Hias Laut.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.



1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money Follow Function* diubah menjadi *Money Follow Program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 diajukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 diverifikasi oleh

Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

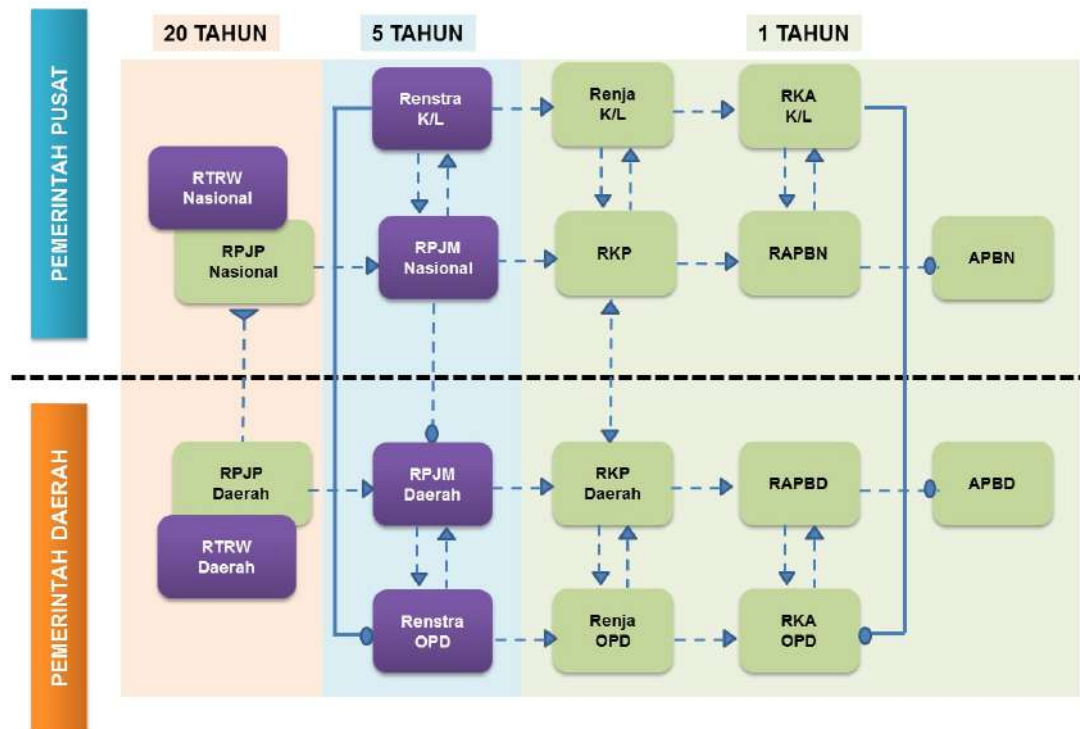
Terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025 pada bulan Agustus Tahun 2024, didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat,

maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1. 1
Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Lainnya



Mengacu pada gambar di atas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Bali Nomor 2); dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan di Atas bahwa maksud penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2025 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2025 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2025 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2025;
2. Merancang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2025;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
4. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD tahun 2025.

1.4 Sistematisa Penyusunan Akhir Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan

sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Bab IV Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain :Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU

Bab II berisi tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi berupa Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Review terhadap RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan), kemudian di tetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 TW III			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	5,60%	96,72%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	(Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 TW III			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,19%	92,12%	91,95%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha	2%	0,5%	25%	$X_{kp}=(X_1+X_2+X_3+X_4)/4$
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	80 Nilai	98,77%	Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa **pada triwulan III Tahun 2024 kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali tercatat sebesar 5,60 %** dari total kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 13,43% pada Triwulan III Tahun 2024, Kontribusi terbesar PDRB berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Bali pada periode ini adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai sekitar 20,64% dari total PDRB Provinsi Bali. Kontribusi yang besar dari sektor tersebut mencerminkan struktur ekonomi Provinsi Bali yang di dominasi oleh sektor pariwisata. **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di tahun 2024 Triwulan III sebesar 4% dari 6% yang telah di targetkan pada tahun 2024**, data ini diperoleh berdasarkan jumlah pemanfaatan ruang laut berdasarkan data BPSPL Denpasar sebanyak 523 Pelaku Usaha dengan Jumlah Verifikasi yang dikeluarkan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebanyak 19 Pelaku Usaha.

Meningkatnya kesejahteraan Nelayan di Provinsi Bali di hitung melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 92,12% di Tahun 2024 sampai dengan triwulan III, NTN dihitung dari Indeks Harga yang diterima nelayan dibagi dengan Indeks Harga yang dibayar nelayan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun

untuk biaya produksi. **Pada Sasaran terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan** dihitung melalui Indeks Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha yang di kelompokkan berdasarkan sub sektor antara lain (1) kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut; (2) kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap; (3) kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya; dan (4) kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang berkaitan dengan Sasaran Strategis ini baru melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Kewenangan Provinsi serta kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menyebabkan **Capaian Sasaran ini baru tercapai sebesar 0,5% dari 2% yang telah di targetkan.**

Pada sasaran meningkatnya manajemen kinerja organisasi di gunakan tolak ukur **Nilai Manajemen Kinerja Organisasi dimana sampai dengan triwulan III Tahun 2024 tercapai sebesar 81 Nilai atau sudah tercapai sebesar 100%**, pengukuran di lakukan untuk melihat kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	5,60%	96,72%	Pencapaian Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya serta Meningkatkan konsumsi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							dan produksi produk olahan hasil perikanan
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	Pencapaian Realisasi Triwulan Tahun 2024 III	Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,19%	92,12%	91,95%	Pencapaian Realisasi Triwulan Tahun 2024 III	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha	2%	0,5%	25%	Pencapaian Realisasi Triwulan Tahun 2024 III	Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	80	98,77%	Pencapaian Realisasi Triwulan Tahun 2024 III	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun realisasinya **belum semua mencapai 100%**. Terhadap permasalahan yang muncul dapat ditangani melalui solusi antara lain (1) Sasaran Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui peningkatan pengajuan penerbitan izin usaha perikanan serta peningkatan pengelolaan budidaya perikanan di darat, kemudian untuk solusi Meningkatkan konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan melalui peningkatan unit usaha pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar izin usaha serta peningkatan mutu produk hasil perikanan; (2) Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan melalui peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan pengajuan verifikasi teknis kesesuaian rung perizinan berusaha, serta

peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Nelayan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap melalui peningkatan produksi perikanan tangkap serta peningkatan usaha perikanan tangkap di pelabuhan; (4) Sasaran Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui menyelenggarakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepada unit usaha perikanan; dan (5) Sasaran Strategis Meningkatnya manajemen kinerja organisasi solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui menyusun laporan keuangan dengan baik, peningkatan layanan administrasi umum perangkat daerah, mewujudkan pengadaan barang milik daerah, peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, serta mewujudkan barang milik daerah dalam kondisi baik.

Kemudian untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	5,79%	4,41%	76,17%	2.950.639.720	967.760.168	33%
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	6%	4%	66,67%	1.376.733.520	668.289.430	49%
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	100,19 %	92,12%	91,95%	481.614.400	174.264.030	36%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2%	0,5%	25%	562.144.940	91.214.761	16%
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	81	80	98,77%	26.409.982.152	18.133.779.724	69%
TOTAL					31.299.982.346	20.035.308.112	64%

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik walaupun capaian realisasi sudah tergolong cukup Baik **sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.20.035.308.112,00-** dengan target tahun 2024 sebesar Rp. 31.299.982.346,00- dengan tingkat **capaian sebesar 64%**.

Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, Dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil	44%	44%	100%	Menunjang
		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir	102.575,33 Ha	44.813,58 Ha	43,69%	Menunjang

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	<i>dan Pulau - Pulau Kecil</i>				
		<i>Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan</i>	4 Kelompok	16 Kelompok	400%	Menunjang
2	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap</i>	103.696,1 Ton	76.429,70 Ton	73,71%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i>	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan</i>	8.000 Ton	3.675 Ton	45,94%	Menunjang
3	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	32.645,12 Ton	23.352,31 Ton	71,53 %	Menunjang
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	1%	50%	Menunjang
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/Kpt/Tahun	48 Kg/Kpt/Tahun	94,23%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</i>	<i>Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina</i>	25 Unit Usaha	23 Unit Usaha	92,00%	Menunjang

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>					
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2%	0,5%	25%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil</i>	30 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	27%	Menunjang
UPTD Produksi Perikanan Budidaya							
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	<i>Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas</i>	1.250.000 Ekor	2.247.600 Ekor	180%	Menunjang
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan							
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2%	1%	50%	Menunjang

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan</i>	2.500 Rekomendasi	2744 Rekomendasi	110%	Menunjang
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71%	3,71%	5%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</i>	4	2	50%	Menunjang
UPTD Pelabuhan Perikanan							
1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	1 %	50 %	Menunjang
		<i>Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan</i>	8.000 Ton	3.675 Ton	45,94%	Menunjang

Terdapat 5 (lima) Program yang menunjang Capaian Kinerja tersebut. Pada Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program

Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil, Pada Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan Nelayan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kemudian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB terdapat 2 (dua) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta pada Sasaran Strategis Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Selain kelima program di atas, Program dan Kegiatan pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Kesekretariatan

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							
1	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Dokumen	16 Dokumen	27%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
UPTD Produksi Perikanan Budidaya							
1	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
UPTD Pelabuhan Perikanan							
1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	75%	75%	Pendukung
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	75%	75%	Pendukung
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	75%	75%	Pendukung
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	75%	75%	Pendukung

Jika dilihat pada tabel di atas capaian Kegiatan pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 baru mencapai 75% dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Pada capaian Program sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sudah mencapai 98,77%.

2.3 Isu - Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan untuk menunjang Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tanggung dan Sejahtera serta Peningkatan Daya Saing Daerah. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Nonrenewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Permasalahan yang teridentifikasi pada tahun 2024 antara lain yaitu belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, belum optimalnya angka konsumsi ikan di provinsi bali, serta belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu yang menjadi isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025 yaitu perlunya mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tingkat konsumsi dan produksi produk hasil olahan perikanan juga perlu ditingkatkan, serta fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub sektor perikanan tangkap, sub sektor perikanan

budidaya, dan sub sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian yang lebih.

2.4 Review Terhadap RKPD

Dalam Review terhadap RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama pada tahun 2025. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2025, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan indikator sudah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (**Lampiran I**).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	<i>Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat</i>
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 %	<i>= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%</i>
			Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 %	<i>= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%</i>
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 %	<i>= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)</i>

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %	$= ((\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1 \times 100\%)$
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 %	<i>Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = $(KPU/JKPU) \times 100\%$ KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan</i>
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 %	$= ((\text{Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun } n - \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun } n-1 \times 100\%)$
			Tingkat Konsumsi Ikan	49,65 Kg/ Kapita/ Tahun	$AKI = A+B+C$ AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 %	$= ((\text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n - \text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n-1) / \text{Jumlah sampel yang di uji tahun } n-1 \times 100\%)$

Terdapat masukan dan saran dari Peserta Forum Konsultasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
 - a. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan tujuannya adalah memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah. Yang mana hasil dari kegiatan ini selanjutnya juga akan di bahas dalam forum Musrenbang RKPD Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. Kami melihat bahwa potensi sumber daya kelautan memiliki yang sangat besar sehingga perlu dikembangkan konsep tata kelola secara terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - c. Untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan dan mengintensifkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk pengembangan dan peningkatan realisasi kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
 - d. Produksi dan budidaya ikan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk ekspor;
 - e. Tingkat Konsumsi Ikan di Provinsi Bali masih di bawah angka Nasional tadi disampaikan sudah terdapat program-program dalam meningkatkan konsumsi ikan di provinsi bal, karena seperti yang kita ketahui hasil produksi kita sudah banyak akan tetapi masyarakat dalam konsumsi ikan masih rendah;

- f. Pemberdayaan masyarakat pesisir terkait produksi garam lokal Bali agar diperhatikan karena merupakan komoditas strategis dengan potensi sangat besar termasuk di hilirnya;
- g. Terkait wisata bahari bisa dimantapkan lagi seperti apa konsepnya agar dapat berjalan dengan baik;
- h. Dalam kegiatan Kawasan konservasi bagaimana caranya agar kegiatan tersebut tidak terganggu oleh kegiatan pariwisata, perlu dipertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya;
- i. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kemampuan APBD kita terbatas untuk itu kami mohon dapat dimanfaatkan sumber-sumber pendanaan lainnya, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari *stakeholder* terkait.

2. Dinas Perikanan Kabupaten Badung

- a. Tadi telah banyak disampaikan tentang arah kebijakan program dan sasaran, memang itulah yang terjadi kita di dinas perikanan tidak hanya di provinsi apalagi jika kita lihat tadi permasalahan-permasalahan yang ada terutama di sektor kelautan, memang di sektor kelautan tidak bisa diprediksi, seperti saat ini di Bandung nelayan kami tidak bisa maksimal di bulan-bulan ini untuk melaksanakan kegiatan. Yang pertama karena faktor cuaca, yang kedua juga terkait sampah di mana fenomena saat ini justru sampah plastik yang banyak, kami tidak tahu apakah ada pergiliran sampah yang naik ke darat kalau dulu sekitar bulan Desember Januari malah sampah-sampah kayu, sekarang justru sampah-sampah plastik;
- b. Kami dari dinas perikanan Bandung sangat mendukung apa yang telah diprogramkan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Bali dan kami pun sangat membutuhkan apa-apa yang memang menjadi program terutama

tadi disampaikan dari segi sektor budidaya dalam penyediaan benih ikan, terkait dengan hal itu ke depan kami akan meminta bantuan melalui UPTD yang berada di Sangeh jika ada kelompok-kelompok kami yang ingin memperoleh bantuan;

- c. Adanya Pemetaan tentang potensi di masing-masing kabupaten/kota, hendaknya itu bisa dipertimbangkan untuk bisa diangkat, seperti di Buleleng apa potensi yang bagus di situ ataupun kami di Bandung selain di sektor perikanan yang paling utama kami sampai saat ini yaitu sektor pariwisata dan itu pun merupakan tantangan kami khususnya dinas perikanan bagaimana bisa mengekskiskan para nelayan yang ada, karena dari data yang kami peroleh hampir sekitar 50% nelayan-nelayan kami beralih ke sektor pariwisata.
 - d. Saat ini memang perikanan budidaya yang kami kembangkan adalah nila, lele dengan karper. Kalau Mujair memang saat ini kita belum bisa mengembangkan karena dengan tingkat kepunahan yang hampir Puna hingga saat ini;
 - e. Dari sisi pengawasan kendala kami khususnya di sektor kelautan sering menerima informasi dari nelayan bahwa masih ada nelayan-nelayan luar yang mencari ikan di wilayah perairan kita, jadinya kesempatan kita untuk mencari ikan di wilayah yang sesuai ketentuan kita itu sudah didahului oleh nelayan-nelayan luar yang mempunyai sarana dan prasarana yang lebih canggih.
3. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
 - a. Dari paparan yang sudah disampaikan saya ada melihat permasalahan terkait adanya degradasi kualitas lingkungan hidup, sekiranya apa yang

- sudah dilakukan dinas kelautan dan perikanan provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Kemudian apakah dinas kelautan dan perikanan provinsi Bali sudah memiliki inovasi ke depan yang sekiranya dapat dikerjasamakan dengan Brista Provinsi Bali untuk dibuatkan kajian atau penelitian misalnya seperti pemanfaatan sumber daya kelautan melalui bioteknologi, menghasilkan produk kosmetik melalui rumput laut.
4. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
- a. Yang menjadi tugas besar bagaimana ikan itu hidup di ruang yang sehat, informasi yang dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi pencemaran. Terkait hal itu mungkin bisa membentuk tim terkait pengelolaan lingkungan untuk bisa Bersama sama mengawasi, mensosialisasikan bagaimana menjaga lingkungan;
 - b. Terkait dengan potensi produksi perikanan apakah sudah seimbang antara jumlah ikan yang diambil dengan tingkat reproduksi ikan tersebut agar terjadi keseimbangan.
5. Akademisi
- a. Jadi pada prinsipnya permasalahan, solusi atau *goals* yang ada di sektor kelautan dan perikanan provinsi Bali hampir sama. Tadi apa yang telah disampaikan oleh bapak kepala dinas terkait permasalahan sasaran dan strategi sudah sangat bagus tetapi di masih lebih banyak kalau saya melihat dari sisi akademisi bersifat teknis, kalau kami mungkin hal-hal yang bersifat eksploratif maupun mencari solusi terhadap permasalahan yang ada secara fundamental masih sedikit, kamu tidak tahu dari sisi akademisi di mana kami bisa banyak berkontribusi;

- b. Begitu juga dengan pemerataan stok ikan yang ada di Kawasan provinsi Bali maupun di sekitarnya, jadi kami dengan menggunakan teknologi GPS secara rutin melakukan Pemetaan stok ikan di mana sebaiknya nelayan menangkap ikan sehingga nelayan itu tidak mencari-cari ikan lagi tetapi sudah menuju pada posisi yang akurat sehingga harapannya adalah hasil tangkapannya bisa bagus;
 - c. Begitu juga kaitannya dengan degradasi masalah pantai ataupun laut terkait pencemaran sampah plastik, kami bekerja sama dengan banyak institusi dari dalam dan luar negeri terkait seberapa jauh ikan yang sudah tercemar sampah plastik;
6. UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP
- a. Proses sertifikasi yang kami tangani, yang berkaitan dengan kegiatan kita di provinsi Bali :
 - 1) Cara penanganan ikan yang baik di atas kapal;
 - 2) Cara penanganan ikan yang baik di *supplier*;
 - 3) Sertifikasi HACCP di perusahaan untuk ekspor;
 - 4) Sertifikasi cara pendistribusian obat ikan;
 - 5) Cara pengolahan ikan.
 - b. Terlepas daripada itu tidak semuanya bisa kami lakukan sendirian, karena nanti akan ada dari tugas-tugas tersebut dilakukan kerja sama antara Kabupaten/kota dan provinsi berupa MOU antara UPT atau Satker yang ada di provinsi Bali dengan dinas kabupaten atau kota dan dengan dinas yang ada di provinsi Bali;

- c. Selain itu juga terkait kegiatan teknis rekan-rekan Pembina mutu yang ada di dinas provinsi , kami juga akan melakukan kerja sama karena kami secara menyeluruh itu terbagi dua untuk kapasitas SDM yang ada;
 - d. Kemudian terkait adanya beberapa masukan tentang benih ikan selama tahun 2023, dapat dilaporkan bahwa dalam satu bulan terdapat benih lele yang masuk ke provinsi Bali sebanyak hampir sekitar 20.000.000 ekor/minggu, kemudian benih ikan nila hampir 75.000 ekor/minggu dan juga benih ikan Mas hampir 1000 ekor/hari. Bahwa tingginya konsumsi ikan di provinsi Bali apakah ini disebabkan karena kita tidak bisa memproduksi atau terdapat kendala dari produksi benih tersebut, karena benih yang keluar menuju timur (Bali) tidak terlalu banyak mungkin di bawah 5% dari benda yang ada masuk dari Jawa ke provinsi Bali;
 - e. Dan juga setelah kami telusuri bahwa di tahun 2022 dan tahun 2023 banyaknya penyakit ikan air tawar muncul terbaru, terdapat empat jenis penyakit ikan muncul yang baru yang belum pernah ada di provinsi Bali.
7. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) KKP
- a. Dari hasil diskusi tadi telah disampaikan ada 11 permasalahan, mungkin bisa ditambahkan terkait permasalahan sampah plastik, karena pengelolaan sampah plastik di laut itu merupakan program prioritas dari kementerian kelautan dan perikanan hal ini menjadi perhatian serius pada acara G 20 selalu disinggung terkait permasalahan sampah plastik;
 - b. Kami dari kementerian kelautan dan perikanan dalam mencapai program prioritas tadi kita ada yang namanya bulan cinta laut yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022, hal ini ke depannya mungkin bisa dilakukan

secara bersama-sama. Di dalamnya untuk kegiatan bulan cinta laut itu terdapat kegiatan nasional bersih pantai dan laut;

8. Destructive Fishing Watch (DFW)
 - a. Dalam satu tahun terakhir kami mencoba memotret terkait kondisi pekerja perikanan yang bekerja di kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di laut, kenapa isu ini menjadi fokus kami karena mereka ini mempunyai peran penting dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan, mereka yang berjuang untuk melakukan proses penangkapan ikan namun dari sisi aspek perlindungan masih sangat lemah;
 - b. Dari paparan yang sudah disampaikan terdapat 11 permasalahan, akan tetapi kami belum dapat melihat strategi terkait pengawasan dan perlindungan bagi industri perikanan.
9. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (Gahawisri) Bali
 - a. Gahawisri merupakan gabungan pengusaha wisata bahari yang juga bergerak di pelestarian lingkungan ruang laut, dan sering melakukan penanaman terumbu karang. Kami menginginkan agar tetap dijaga alam di Nusa Penida yang begitu Indah kami jual untuk promosi pariwisata di Provinsi Bali;
 - b. Disamping itu kami memiliki program yang ingin sekali kita wujudkan di tahun ini akan tetapi terbentur dengan program yang dimiliki oleh POSI (persatuan olahraga selam seluruh Indonesia), yaitu ingin sekali kami membuat Bali Marine Festival.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
 - a. Jika kita berbicara terkait perencanaan oleh sebab itu target juga kita perlu untuk di diskusikan agar nantinya bisa kita diskusikan sampai ke level

Kabupaten/Kota, kami ingin mengusul untuk budidaya selama ini target kita selalu memakai ton, tidak pernah menggunakan ekor untuk benih;

- b. Kemudian untuk target yang lain seperti garam perlu dipasang nilai tukar nelayan (NTN), di mana biasanya NTN hanya dihitung sampai tingkat provinsi oleh BPS, hal ini perlu kita diskusikan agar bagaimana pelibatan dalam menghitung NTN sampai pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Terkait dengan yang di kelautan kami sepakat dengan apa yang disampaikan yaitu pengelolaan lingkungan terkait sampah pesisir.

Untuk lebih lengkapnya terkait hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dapat dilihat pada **Lampiran**. (Tabel T-C. 29, Tabel T-C. 30, Tabel T-C. 31 dan Tabel T-C. 32).

An underwater photograph of a vibrant coral reef. The scene is illuminated by natural light filtering through the water, creating a blue and green color palette. Various types of coral are visible, including branching corals in shades of pink, purple, and red, and a large, textured brown coral structure on the right. Small yellow fish are swimming near the bottom of the frame.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan dan sektor Kelautan dan Perikanan secara ringkas yaitu :

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Terkait dengan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu Meningkatkan perekonomian Krama Bali dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Mewujudkan Stabilitas Harga - Harga Kebutuhan Bahan Pokok dengan indikator Angka Inflasi, hasil atau *outcome* yang di harapkan nantinya yaitu untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menjadi prioritas atau Sasaran Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
2. Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan;
4. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategis untuk menunjang kegiatan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya Manajemen Kinerja Organisasi.

Strategi dan Arah Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu:

Tabel 3. 1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Tujuan 1	T1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali			
Indikator Tujuan	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
Sasaran	S1.1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	ST1.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi
			ST1.1.2	Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
			ST1.1.3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN)
	S1.2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah	ST1.2.1	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	ST1.2.2	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Tujuan 2	T2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok			
Indikator Tujuan	:	Angka Inflasi			
Sasaran	S2.1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	ST2.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap
	S.2.2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	ST2.2.1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan mengenai :

3.3.1 Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pengentasan Kemiskinan di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pengentasan kemiskinan di Sektor Kelautan dan Perikanan memerlukan berbagai pertimbangan strategis agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien. Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan meliputi:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Program yang dirumuskan harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya laut dan perikanan. Hal ini

termasuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan tidak merusak ekosistem dan dapat mempertahankan populasi ikan untuk jangka panjang.

- 2) **Pemberdayaan Masyarakat:** Pertimbangan ini melibatkan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.
- 3) **Sarana dan Prasarana yang Memadai:** Penyediaan perahu tempel dan kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan akan membantu mereka mencapai lokasi penangkapan ikan dengan lebih cepat dan efisien, serta Penyediaan alat tangkap ikan yang berkualitas dan sesuai dengan jenis ikan yang ditangkap akan meningkatkan jumlah dan kualitas hasil tangkapan.

b. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

1) **Potensi Perikanan Tangkap:**

Provinsi Bali memiliki potensi perikanan tangkap yang signifikan, dengan sumber daya ikan yang melimpah di berbagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di sekitarnya, potensi ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali.

Gambar 3. 1
Potensi Perikanan Tangkap

Potensi Sumber Daya Ikan	Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap:	Komoditas Potensial/Pendukung:
<ol style="list-style-type: none"> SDI di perairan laut wilayah Bali (0 – 12 mil laut): <ul style="list-style-type: none"> Potensi lestari = 147.278,75 ton/tahun ✓ Ikan pelagis = 123.906,0 ton/tahun ✓ Ikan demersal dan ikan karang = 23.372,75 ton/tahun Tingkat pemanfaatan (2019-2023) = 70,36 % SDI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (12-200 mil laut): <ul style="list-style-type: none"> WPP-NRI 573 = 1.267.540 ton/tahun WPP-NRI 718 = 1.992.730 ton/tahun SDI di kawasan antarwilayah Laut Bali (>12 mil laut) <ul style="list-style-type: none"> WPP-NRI 713 = 1.177.857 ton/tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Tuna: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas produksi :18.000 – 20.000 ton/tahun Sentra produksi: Denpasar, Buleleng, Karangasem Cakalang: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas produksi : 10.000 – 12.000 ton/tahun Sentra produksi: Denpasar, Buleleng, Karangasem Tongkol: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas produksi: 22.000 – 25.000 ton/tahun Sentra produksi: Buleleng, Karangasem, Klungkung Lemuru: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas produksi: 20.000 – 30.000 ton/tahun Sentra produksi: Jembrana, Badung 	<ol style="list-style-type: none"> Lobster: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 150 – 200 ton/tahun Sentra: Gianyar, Badung, Tabanan Ikan dasar – kurisi, kerapu, layur, kakap, beronang: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 2.000 – 5.000 ton/tahun Sentra: Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan Cumi-cumi: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 5.000 – 10.000 ton/tahun Sentra: Buleleng, Jembrana, Denpasar Ikan layang: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 7.000 – 10.000 ton/tahun Sentra: Buleleng, Jembrana Ikan lemadang, layaran, setuhuk: <ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 5.000 – 10.000 ton/tahun Sentra: Denpasar, Buleleng, Badung

2) Potensi Perikanan Budidaya:

Provinsi Bali memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, didukung oleh kondisi alam yang ideal dan keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan pengelolaan yang tepat, perikanan budidaya di Bali dapat menjadi sektor yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Gambar 3. 2
Potensi Perikanan Budidaya

Potensi Sumber Daya Lahan/Perairan	Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya:	Komoditas Baru Potensial
<ol style="list-style-type: none"> Potensi Perairan Budidaya Laut: 9.122,5 Ha <ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, Denpasar Tingkat pemanfaatan = 0,4 % Potensi Lahan Budidaya Air Payau: 1.501 Ha <ul style="list-style-type: none"> Lokasi: Buleleng, Jembrana Tingkat pemanfaatan = 22,8 % Budidaya Lahan Budidaya Air Tawar: 15.968 Ha <ul style="list-style-type: none"> Lokasi: seluruh kabupaten/kota Tingkat pemanfaatan = 7,2 % 	<ol style="list-style-type: none"> Benih ikan bandeng: 5 miliar ekor/tahun (Buleleng) Benih ikan kerapu: 25 juta ekor/tahun (Buleleng, Jembrana) Benih Vanale: 1,5 miliar/tahun (Buleleng, Jembrana) Ikan kerapu: 3.000 ton/tahun (Buleleng, Jembrana) Udang vaname: 20.000 ton/tahun (Buleleng, Jembrana) Rumput laut: 140.000 ton/tahun (Klungkung, Buleleng, Jembrana, Badung, Denpasar) Ikan nila: 10.000 ton/tahun (Tabanan, Bangli, Jembrana) kan gurami: 2.000 ton/tahun (Tabanan, Jembrana) Lele: 5.000 ton/tahun (Tabanan, Jembrana, Denpasar) Udang galah: 1.000 ton/tahun (Gianyar, Karangasem) 	<ol style="list-style-type: none"> Abalon: Klungkung, Buleleng, Karangasem Kepiting bakau: Jembrana, Buleleng, Denpasar Rajungan: Klungkung, Buleleng Teripang: Klungkung, Buleleng Lobster: Buleleng, Karangasem, Jembrana Anggur laut: Buleleng Kakap putih: Buleleng Kakap air tawar: Tabanan, Jembrana

3) Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan:

Provinsi Bali memiliki potensi pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan nilai tambah produk kelautan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor ini secara berkelanjutan.

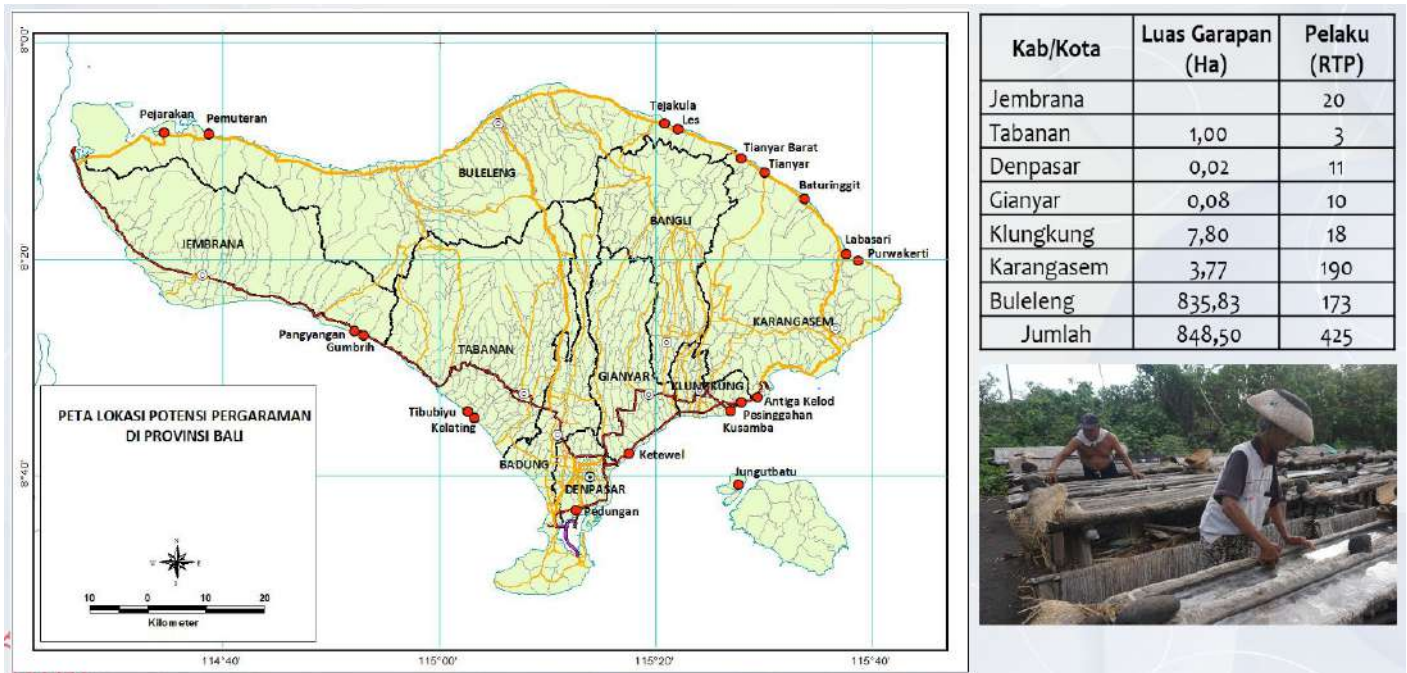
Gambar 3. 3
Potensi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Jenis & Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	3. Sentra/Pemusatan Industri Pengolahan Ikan:
<ol style="list-style-type: none"> Usaha mikro dan kecil pengolahan & pemasaran hasil perikanan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah UMK: 931 unit <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemindangan = 126 UMK ✓ Pembekuan = 23 UMK ✓ Pemindangan = 433 UMK ✓ Pengolahan Produk Segar = 80 UMK ✓ Pengasapan/Pengeringan = 29 UMK ✓ Penggaraman/Pengeringan = 45 UMK ✓ Pereduksian = 24 UMK ✓ Pengolahan lainnya = 171 UMK Tenaga kerja = 17.541 orang Pelaku Usaha: CV = 18; Koperasi = 2; Badan Hukum lainnya = 26 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Non-UPI Menengah dan Besar <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Usaha = 74 perusahaan Tenaga Kerja = 30.668 orang Jenis Usaha: ikan kaleng, produk beku, produk segar, ekstrak rumput laut, ikan hidup, snack ikan (stick & chip), abon ikan, fish jelly products, keripik belut, spirulina powder 	<ul style="list-style-type: none"> Sentra pemindangan: Kusamba (Klungkung) = 80 UMK Pelabuhan Benoa = 27 UMB Denpasar Selatan = 13 UMB Pengambangan = 12 UMB Gerokgak = 7 UMB

4) Garam Tradisional Lokal Bali:

Garam tradisional lokal Bali merupakan warisan budaya yang tak ternilai, diproduksi secara tradisional dengan teknik yang telah diwariskan secara turun temurun, mencerminkan kekayaan alam dan keahlian lokal dalam menghasilkan garam berkualitas tinggi.

Gambar 3. 4
Garam Tradisional Lokal Bali



5) Potensi Perikanan Produk Hias Laut:

Potensi perikanan produk hias laut di Bali menawarkan peluang besar dalam mengembangkan pasar internasional, dengan keanekaragaman spesies yang memikat dan mendukung industri pariwisata serta keberlanjutan ekosistem laut.

Gambar 3. 5
Potensi Perikanan Hias Laut



c. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Dalam upaya menghadapi peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha di daerah atas diselenggarakannya penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang lebih efektif dan lebih mudah, dibutuhkan kesiapan pengawasan kegiatan usaha yang lebih efektif, efisien, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan sinergitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program pembangunan kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang

dilakukan, tetap mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk **Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tanggung dan Sejahtera, serta Memperkuat Daya Saing Daerah** disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan, seperti pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran**. (Tabel T-C. 33)

An underwater photograph featuring a large shark swimming in the upper half of the frame. Below the shark, a vibrant coral reef is visible, populated with various colorful fish, including a prominent yellow and black striped fish in the lower right. The water is clear and blue, with light filtering through from above.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali akan diuraikan tentang rencana kerja dan pendanaan yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

Untuk melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 36.174.908.553,00. Program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

1.6.2 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

1.6.3 *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

1.6.4 *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

2.1 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2.1.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat*

2.1.2 *Sub Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru*

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

2.2.1 *Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

3.1.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*

3.2 Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

3.2.1 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan*

3.3 Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

3.3.1 *Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT*

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

4.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

4.1.1 *Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut*

4.1.2 *Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

4.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

4.2.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

5.1.1 *Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi*

5.1.2 *Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)*

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

6.1 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6.1.1 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing*

6.1.2 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*

Secara detail Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam **Lampiran.** (Tabel T-C. 33)





BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan antara lain Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Rencana Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025. Penyusunan Renja ini telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. Renja ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bukan ditentukan oleh dokumen Renja melainkan implementasinya terutama adanya dukungan dari sektor terkait lainnya, dan masyarakat secara luas serta adanya komitmen dan kerja keras dari segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam mencapai harapan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 untuk setiap program, kegiatan dan sub

kegiatan yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran serta mengacu pada ketentuan yang berlaku;

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bidang terkait dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali;
3. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan ; dan
 - c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun

2024-2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan . Kami berharap, bahwa Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 pada urusan Kelautan dan Perikanan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan Rencana Kerja.

Demikian, dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 telah disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 19 Agustus 2024

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali**



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003

A detailed underwater photograph of a coral reef. The scene is illuminated from above, creating a gradient of light from bright blue at the surface to deep blue and dark shadows at the bottom. The reef is composed of various coral species, including large, textured brown corals, bright pink and orange branching corals, and smaller, more delicate structures. Several small, colorful fish, including yellow ones and a purple one, are swimming around the coral. The overall composition is rich and textured, showcasing the biodiversity of the reef.

LAMPIRAN

Tabel T- C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan III
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(5+7+10)	12=(11/4)					
3		Usuran Pemerintaan Pilihan														
3	25	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan														
3	25	01	Program : Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%		
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%		
3	25	01	1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	25	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	0	4	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%
3	25	01	1.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	0	4	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	700	260	260	260	100,00%	60	44	564	81%
3	25	01	1.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	590	114	118	108	91,53%	118	102	324	55%
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	0	1	0	0,00%	5	5	5	31%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	23	0	1	0	0,00%	7	2	2	9%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	17	1	1	1	100,00%	5	4	6	35%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	0	1	0	0,00%	3	2	2	18%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	9	9	15%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	0	1	0	0,00%	3	2	2	18%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	0	0	0%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	9	9	15%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	43	8	8	8	100,00%	9	7	23	53%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	3	3	3	100,00%	3	2	8	53%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	0	1	0	0,00%	10	1	1	3%	
3	25	02			Program : Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	44%	44,00%	44,00%	44%	
						Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	Kawasan	5	2	5	4	80,00%	0	0	4	80%	
3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	21.192,51	76.822,74	44.712,50	58,20%	102.575,33	44.813,58	44.712,50	44%	
3	25	02	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	57.862,83	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	44.712,50	20.057,00	21.192,51	37%	
3	25	02	1.01	03	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	22.022,74	0,00	22.022,74	0	0,00%	0	0	0,00	0%	
3	25	02	1.02		Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	Pelaku Usaha	150	33	40	62	155,00%	0	0	95	63%	
3	25	02	1.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	110	32	40	48	120,00%	0	0	80	73%	
3	25	02	1.03		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	23	4	4	2	50,00%	4	12	18	78%	
3	25	02	1.03	01	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	210	40	30	38	126,67%	40	40	118	56%	
3	25	02	1.03	02	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	15	4	0	0	0,00%	4	12	16	107%	
3	25	02	1.03	03	Sub Kegiatan : Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	150	0	0	0	0,00%	40	40	40	27%	
3	25	02	1.03	04	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	4	4	2	50,00%	4	0	6	30%	
3	25	03			Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	6%	0	0%	0	0,00%	2%	1%	1%	17%	
						Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	212.436,35	124.010,15	107.269,84	110.863,70	103,35%	103696,1	76429,7	311.303,55	147%	
3	25	03	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	317.351,54	0	0,00	0	0,00%	103.696,10	76.429,70	76.429,70	24%	
						Tersedianya data dan Informasi sumber daya ikan	Kali	6	0	3	0	0,00%	0	0	0	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	03	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	15	1	3	0	0,00%	0	0	1	7%	
3	25	03	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	16	0	4	0	0,00%	4	1	1	6%	
3	25	03	1.01	03	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	50	5	25	20	80,00%	0	0	25	50%	
3	25	03	1.09		Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	25.500	0	0	0	0,00%	8.000	3.675	3.675	14%	
3	25	03	1.09	02	Sub Kegiatan : Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	90	0	0	0	0,00%	30	30	30	33%	
3	25	04			Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	6%	0%	0%	0	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	38.342,02	32.060,08	19.360,82	32.220,50	166,42%	32645,1	23966,41	88.246,99	230%	
3	25	04	1.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	Sertifikat	465	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.01	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	99.906,86	0	0,00	0,00	0,00%	32.645,10	23.966,41	23.966,41	24%	
						Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kali	72	0	40	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	25	0	10	10	100,00%	1	0	10	40%	
3	25	04	1.05	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti Bimtek Rumpuk Laut	Orang	210	0	120	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05	06	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	162	0	40	0	0,00%	6	6	6	4%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	140	25	25	28	112,00%	25	46	99	71%	
3	25	06	1.02	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	140	25	25	28	112,00%	25	46	99	71%	
3	25	06	1.03		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Potensi Peluang Usaha Investasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Potensi	18	0	9	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	06	1.03	01	Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
UPTD Produksi Perikanan Budidaya																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0		80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	1	100,00%	1	1	2	40%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	1	3	60%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	0	1	1	100,00%	2	0	1	13%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	75%	75%	75%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	0	0	0,00%	3	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100,00%	12	0	24	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100,00%	12	9	33	55%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	5	5	5	100,00%	5	3	13	52%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	0	0	0	0,00%	3	1	1	11%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	0	3	3	100,00%	3	3	6	40%	
3	25	04			Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	6%	0%	0%	0%	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	Komoditas	6	3	3	3	100,00%	0	0	6	100%	
3	25	04	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	6.210.000	2.692.450	1.210.000	1.210.000	100,00%	1.250.000	2.247.600	6.150.050	99%	
3	25	04	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	0	0	0	0,00%	2	2	2	33%	
						Jumlah paket teknologi perikanan budidaya	Paket	6	3	3	3	100,00%	0	0	6	100%	
3	25	04	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	0	0	0	0,00%	4	2	2	13%	
						jumlah benih, calon induk dan induk	Ekor	2.310.000	2.692.450	1.210.000	1.210.000	100,00%	0	0	3.902.450	169%	
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%				
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	75,00%	100,00%	100%		
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	1	0,00%	1	1,00	1,00	17%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	100,00%	1	1,00	3,00	50%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	0	1	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0,00%	100%	75%	75%	75%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0,00%	1	0,25	0,25	8%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	0,00%	100%	75,00%	75,00%	75%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	0	12	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0	12	0,00%	12	7,00	7,00	10%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	0	2	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	75,00%	100,00%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	1	4	4	100,00%	4	3,00	8,00	33%
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96	0	16	0	0,00%	16	2,00	2,00	2%
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	1	100,00%	1	0,47	2,47	41%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3 25 01 1.09 10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	0	0	0,00%	2	0,00	0	0%	
3 25 06	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	6%	0%	0%	0%	0,00%	2%	1,00%	0,01	17%	
		Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	Sampel	14.850	2.955	5.000	2680	53,60%	0	0	5.635	38%	
3 25 06 1.02	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	7.800	0	0	0	0,00%	2.500	2.744	2.744	35%	
		Jumlah UPI yang Menerapkan Persyaratan Sertifikasi SNI	UPI	111	140	37	70	189,19%	0	0	210	189%	
3 25 06 1.02 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	180	133	30	63	210,00%	30	85	281	156%	
3 25 06 1.02 02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	42	7	7	7	100,00%	7	4	18	43%	
UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali													
3 25 01	Program : Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3 25 01 1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3 25 01 1.06 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	0	1	1	100,00%	2	2	3	33%	
3 25 01 1.06 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	1	3	50%	
3 25 01 1.06 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	0	2	33%	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	0	1	1	100,00%	2	0	1	11%	
3	25	01	1.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Dokumen	36	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	66%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	0	12	12	100,00%	12	12	24	33%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0	12	12	100,00%	12	8	20	28%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	5	5	5	100,00%	5	4	14	47%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	0	1	100%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	02			Program : Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persen	74%	0	0%	0	0,00%	71%	2,42%	2,42%	3%	
						Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	5	1	1	2	200,00%	0	0	2	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	6	0	0	0	0,00%	4	2	2	33%	
						Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Ha	21.192,51	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	0	0	21.192,51	100%	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	46.838,10	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	44.712,50	20.057,00	21.192,51	45%	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
UPTD Pelabuhan Perikanan																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	0	2	33%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	1	1	1	100,00%	10	10	12	36%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	1	1	1	100,00%	2	0	2	22%	
3	25	01	1.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	100,00%	0	0	24	67%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	50%	50%	50%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	0	0	0,00%	12	0	0	0%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	100,00%	12	5	29	40%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	2	2	100,00%	2	2	6	50%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	1	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	03			Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	6%	0	0	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Pelabuhan	2	1	2	100,00%	0	2	5	250%	
3	25	03	1.06		Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	25.500	4.750	5.000	99,62%	8.000	3.675	13.406	53%	
						Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPIB dan keamanan keselamatan nelayan	Layanan	292	0	116	43,10%	0	0	50	17%	
3	25	03	1.06	01	Sub Kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan Perikanan	2	0	2	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	03	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	152	0	2	0,00%	50	0	0	0%	
3	25	03	1.06	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	307	3	116	3,45%	5	2	9	3%	

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Trealisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	N/A	81	82	N/A	N/A	81	82	
3	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya			4 Kawasan	5 Kawasan	N/A	N/A	2	4	N/A	N/A	
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			1 Kawasan	1 Kawasan	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	
5	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			N/A	N/A	44%	46%	N/A	N/A	44%	46%	Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K dikali 100%
6	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			N/A	N/A	71%	73%	N/A	N/A	76,49%	73%	Potensi PAD di kawasan Konservasi/(jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
7	Jumlah produksi perikanan tangkap			105.166,51 Ton	107.269,84 Ton	N/A	N/A	124.010,15 Ton	110.863,70 Ton	N/A	N/A	
8	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan			1 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	
9	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) x 100%
10	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			18.981,20 Ton	19.360,82 Ton			32.060,08 Ton	31.220,50 Ton	N/A	N/A	
11	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut			3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	
12	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1) x 100%
13	Jumlah pelaku usaha taat Hukum			18 Pelaku Usaha	23 Pelaku Usaha	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Trealisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
14	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			N/A	N/A	2%	3%	N/A	N/A	1%	3%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang ter-data pada tahun berjalan
15	Jumlah produk perikanan bersertifikat			149 SKP	151 SKP	N/A	N/A	282 SKP	189 SKP	N/A	N/A	
16	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan			4.950 Sampel	5000 Sampel	N/A	N/A	2.695 sampel	3.720 Sampel	N/A	N/A	
17	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun n-1)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun n-1) x 100%
18	Tingkat Konsumsi Ikan			N/A	N/A	48,68 Kg/Kpt/ Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	N/A	N/A	48 Kg/Kpt/Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
19	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah sampel yang di uji Tahun n - Jumlah sampel yang di uji Tahun - n)/Jumlah sampel yang di uji tahun -n x 100%)

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	33.523.890.869,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 Nilai	33.523.890.869,00	Dinas dan UPTD
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 Persen	104.596.492,00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 Persen	104.596.492,00	Dinas
		Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 Persen	50.000.000,00		Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 Persen	50.000.000,00	UPTD KKP
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen	472.272.902,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen	472.272.902,00	Dinas dan UPTD Pelabuhan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen	1.023.918.104,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen	1.023.918.104,00	Dinas dan UPTD P2B
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 Persen	181.509.884,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 Persen	181.509.884,00	
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 Persen	323.958.502,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 Persen	323.958.502,00	Dinas
		Tingkat Konsumsi Ikan	49,65 Kg/Kapita/Th	-		Tingkat Konsumsi Ikan	49,65 Kg/Kapita/Th	-	Dinas

No	Rancangan RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
			Capaian	Indikatif			Capaian	Dana	
		Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen	494.761.800,00		Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen	494.761.800,00	UPTD PPMHP
Total				36.174.908.553,00	Total				36.174.908.553,00

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
										K	RP	K	RP		
			3								36.174.908.553		38.506.976.775		
			3	25							32.149.599.099		30.743.518.441		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Keuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Keuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	30.915.912.819	83	25.939.471.414	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	76.748.000	100	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	25	01	1.01	0001 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	76.748.000	4	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersusunnya laporan keuangan dengan baik	3	25	01	1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	25.447.615.889	60	23.748.340.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3	25	01	1.02	0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1610	25.447.615.889	1.610	23.748.340.878	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	1.107.803.300	100	259.712.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	7.459.500	5	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	728.957.900	7	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	189.642.400	5	124.712.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	18.923.500	3	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN	
										K	RP	K	RP			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	162.820.000	12	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	279.565.620	100	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	279.565.620	3	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	134.661.000	100	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.611.000	12	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	131.050.000	12	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	3.869.519.010	100	1.747.418.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	25	01	1.09	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	950.364.936	9	571.337.984	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.828.924.074	3	776.080.172	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	90.230.000	10	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali								Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil							Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%		6%			= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
										K	RP	K	RP		
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSEN	46%	104.596.492	100%	150.511.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	34.495.000	102.575,33	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tertelaksananya Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	3	25	02	1.01	0008 Sub Kegiatan : Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	12	34.495.000	15	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	5	70.101.492	6	90.511.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.03	0001 Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	40	70.101.492	60	90.511.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok								Angka inflasi	Persen	3±1		3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan							Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,25		100,28			Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	PERSEN	2%	424.573.902	2%	555.847.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	1.01	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	105.770,02	390.850.902	107.885,42	500.847.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	1.01	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	390.850.902	4	500.847.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	1.09	Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	8.500	33.723.000	9.000	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
											K	RP	K	RP		
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3	25	03	1.09	0001	Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	33.723.000	30	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSEN	2%	199.047.500	2%	3.532.415.457	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	1.05		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.297,90	199.047.500	33.963,86	3.532.415.457	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	1.05	0004	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	171.427.500	5	3.532.415.457	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	1.05	0013	Sub Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Dokumen	12	27.620.000	12	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok									Angka inflasi	Persen	3±1		3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	3%		4%			$X_{kp} = (X1+X2+X3+X4)/4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	PERSEN	3%	181.509.884	4%	175.769.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN	
										K	RP	K	RP			
		Terselenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	1.01		Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	32	181.509.884	34	175.769.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	1.01	0016	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	30	31.268.900	1	42.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	1.01	0017	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	40	150.240.984	40	133.529.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali									Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN	Persen	2%	323.958.502	2%	389.503.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun - n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)
									TINGKAT KONSUMSI IKAN	KG/ KAPITA/ TAHUN	49,65		50,64			AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	30	323.958.502	35	389.503.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	3	25	06	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	30	323.958.502	35	389.503.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI											1.073.004.792		1.940.079.617			

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
										K	RP	K	RP		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	1.023.004.792	83	1.090.079.617	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	66.348.100	100	44.181.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.848.100	2	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	41.500.000	1	38.181.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	956.656.692	100	1.045.898.417	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	172.510.000	5	83.211.113	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	784.146.692	1	962.687.304	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali								Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil							Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%		6%			= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PEFEKTIFITAS KAWASAN KONSERVASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSEN	73%	50.000.000	74%	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN	
										K	RP	K	RP			
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	5	50.000.000	6	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	1.01	0002	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	46.838,10	50.000.000	46.838,10	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
UPTD PELABUHAN PERIKANAN											333.431.430	576.059.500				
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat	
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	285.732.430	83	306.059.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	86.085.900	100	59.559.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	26.835.900	10	23.506.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000	1	36.053.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	1.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	26.750.000	1	26.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	20.445.200	100	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.445.200	1	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	1	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	12.000.000	100	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
												K	RP	K	RP		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	167.201.330	100	225.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	127.800.000	2	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	39.401.330	1	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok								Angka inflasi	Persen	3±1		3±1			Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS		
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan							Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,25		100,28			Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik		
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	2%	47.699.000	2%	270.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	1.06		Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	8.500	47.699.000	9.000	270.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	1.06	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	1	47.699.000	5	270.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des		
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN											1.148.256.568		3.233.511.321				
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat		
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
										K	RP	K	RP		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	653.494.768	83	3.143.196.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	41.933.000	100	107.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	8.433.000	1	7.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	32.500.000	1	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	2	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	37.072.080	100	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	37.072.080	1	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	118.020.500	100	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.020.500	12	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	117.000.000	12	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	456.469.188	100	3.013.696.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	92.232.000	4	293.196.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN	
										K	RP	K	RP			
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	349.457.188	1	2.700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	14.780.000	22	20.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali								Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)				PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB							Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25				Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK HASIL PERIKANAN	PERSEN	2%	494.761.800	2%	90.314.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun - n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	2.600	494.761.800	2.700	90.314.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	3	25	06	1.02	0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	7	53.241.000	7	90.314.425	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	3	25	06	1.02	0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	7	441.520.800	30	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA											1.470.616.664		2.013.807.896			

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN
										K	RP	K	RP		
Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik								Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86		87			Survey Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi							Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	82		83			Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	82	645.746.060	83	1.163.807.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Tercapainya layanan administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	46.277.200	100	51.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	25	01	1.06	0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.664.000	1	8.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	25	01	1.06	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	7.117.200	1	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	25	01	1.06	0004 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	32.500.000	1	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	25	01	1.06	0005 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.996.000	2	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	3	25	01	1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	38.554.200	100	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	25	1	1.07	0010 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	38.554.200	3	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	25	01	1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	129.070.200	100	140.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	1	1.08	0001 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	471.000	12	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	25	1	1.08	0002 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	128.599.200	12	140.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terwujudnya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	25	01	1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	431.844.460	100	952.307.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	SASARAN ANTARA (IKK)	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025		PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		LOKASI	KETERANGAN	
										K	RP	K	RP			
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	25	01	1.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	166.497.984	5	252.307.896	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	25	01	1.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	265.346.476	3	700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
Meningkatnya perekonomian Krama Bali								Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75 (5,25-6,25)		5,85 (5,35-6,35)			PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS	
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB							Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	6,02		6,25			Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSEN	2%	824.870.604	2%	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Dara	3	25	04	1.06		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.300.000	824.870.604	1.350.000	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	1.06	0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	824.870.604	6	850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	